

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Informasi merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai wadah pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui perancangan sistem pemerintah berbasis elektronik dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Teknologi informasi mempengaruhi cara pandang bisnis. Penerapan TI yang melibatkan proses bisnis suatu organisasi yang dapat meningkatkan keberhasilan dari organisasi tersebut untuk bersaing. Hal ini memastikan bahwa teknologi informasi dapat memaksimalkan keuntungan dan risiko yang diterima dari pengelolaan teknologi informasi yang dilakukan secara tepat. Penerapan TI dalam organisasi dapat berdampak baik apabila ditunjang dengan suatu *IT governance* dari mulai perencanaan hingga tahap implementasi. Pentingnya manfaat *IT governance* tidak muncul secara tiba-tiba. Munculnya hal ini terjadi karena dalam operasional suatu organisasi terdapat hal yang serius (Hengki & Jijon, 2015).

Tata kelola TI adalah pengelolaan organisasi yang telah terintegrasi dan mencakup aspek kepemimpinan, struktur organisasi serta fungsi proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi yang dikelola dimanfaatkan secara optimal oleh organisasi terkait (Surendro, 2009).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau dapat disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Untuk

mendukung penerapan SPBE di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan peraturan terkait SPBE yaitu Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang SPBE.

COBIT 5 merupakan hasil pengembangan dari kerangka kerja sebelumnya yaitu COBIT 4.1. COBIT 5 merupakan generasi terbaru dari *best practice* ISACA yang membahas mengenai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. COBIT 5 dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COBIT selama kurang lebih 15 tahun oleh perusahaan diseluruh dunia mulai dari penggunaan dibidang bisnis, komunikasi, risiko IT, asuransi, dan keamanan. Sehingga COBIT 5 bisa dikatakan sebagai pembantu perusahaan untuk menciptakan nilai yang optimal dari teknologi informasi dengan menyeimbangkan tujuan perusahaan, sumber daya, dan optimasi tingkat risiko (ISACA, 2012).

Pelaksanaan evaluasi SPBE pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dilakukan melalui evaluasi eksternal oleh Kemenpanrb, menghasilkan nilai indeks SPBE berada pada angka 2,61 dari skala 5. Menunjukkan bahwa kondisi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dikategorikan baik. Detail dari penilaian indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat terdapat pada gambar I-1.



Gambar I-1 Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Dengan hasil penilaian SPBE pada gambar I-1, domain tata kelola memiliki penilaian yang lebih rendah dibandingkan dengan domain kebijakan SPBE &

domain layanan SPBE. Sehingga, dengan kondisi saat ini yang sudah diketahui, maka akan dilakukan peningkatan mengenai tata kelola TI untuk meningkatkan indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian yang dilakukan terkait dengan SPBE ini dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat yang merupakan pusat dari penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam memberikan rekomendasi mengenai tata kelola TI dengan menggunakan kerangka kerja TI yaitu COBIT 5 yang berfokus pada domain APO. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam peningkatan tata kelola TI pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat yang terkait pada indeks SPBE.

I.2 Rumusan Masalah

Perumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana rancangan dokumen tata kelola SPBE di Diskominfo KBB berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 menggunakan kerangka kerja COBIT 5?
- 2 Bagaimana estimasi pengaruh jika rekomendasi perancangan tata kelola SPBE menggunakan COBIT 5 terhadap nilai tingkat kematangan SPBE diimplementasikan?

I.3 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Merancang dokumen tata kelola SPBE di Diskominfo Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.
- 2 Mengetahui estimasi pengaruh jika rekomendasi perancangan tata kelola SPBE menggunakan kerangka kerja COBIT 5 terhadap nilai tingkat kematangan SPBE setelah diimplementasikan.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan penilaian terhadap tata kelola SPBE di Diskominfo KBB untuk membantu dalam peningkatan nilai indeks kematangan domain tata kelola SPBE.
2. Memberikan rancangan dokumen dan rekomendasi tata kelola SPBE untuk Diskominfo KBB menggunakan kerangka kerja COBIT 5 sehingga dapat memudahkan dalam pengembangan di masa yang akan datang.
3. Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam bidang tata kelola dan pengelolaan TI SPBE.

I.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya dibatasi oleh proses terpilih yaitu *APO02 Manage Strategy*, *APO05 Manage Portfolio*, *APO07 Manage Human Resource*, dan *APO12 Manage Risk*.
2. Penelitian ini hanya dilakukan dengan menggunakan risiko negatif.
3. Cakupan dalam perancangan penelitian tata kelola SPBE ini menggunakan *COBIT 5 Implementation* sampai dengan fase ke empat yaitu fase perancangan.